

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil identifikasi, terdapat 24 faktor kendala penyebab proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola;
2. Hasil perhitungan *Relative Importance Index* (RII), diperoleh 6 (enam) kendala yang termasuk kategori setuju atau dominan dengan nilai $RII \geq 0,710$ berdasarkan jawaban responden gabungan (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga), yaitu sebagai berikut:
 - 1) Adanya kebijakan dan politik tertentu dalam penentuan pelaksanaan pekerjaan (faktor kendala berdasarkan metode);
 - 2) gangguan *external*/pihak lain di luar para pihak (faktor kendala berdasarkan keadaan alam/lingkungan);
 - 3) Administrasi yang rumit (faktor kendala berdasarkan metode);
 - 4) Kurangnya kemampuan, pengetahuan dan kompetensi pelaksana swakelola (faktor kendala berdasarkan SDM);
 - 5) Adanya *Conflict Of Interest* (faktor kendala berdasarkan keadaan alam/lingkungan);

6) Biaya pengawasan terlalu rendah sehingga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja (faktor kendala berdasarkan keuangan/biaya).

3. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, diperoleh beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kendala pada pelaksanaan proyek swakelola, yaitu:

- 1) Untuk mengantisipasi adanya kebijakan, dibutuhkan manajemen proyek yang mempunyai pengalaman dan kompeten di dalam proyek, sehingga dapat mengambil keputusan dengan menentukan pekerjaan yang lebih diprioritaskan dengan anggaran yang ada. Selain itu perlu dibuat aturan tentang swakelola di level daerah sehingga kebijakan yang ada dapat berpedoman pada aturan swakelola yang dibuat.
- 2) Untuk mengantisipasi gangguan *external*/pihak lain di luar para pihak, maka perlu meningkatkan pengawasan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan. Apabila dari hasil pengawasan terdapat penyimpangan, maka PPK harus segera mengambil tindakan dengan cara memberi teguran langsung agar pekerjaan berjalan sesuai rencana sehingga dapat meminimalkan adanya gangguan dari pihak *external*.
- 3) Untuk mengantisipasi administrasi yang terlalu rumit, maka dibutuhkan pengaturan proses pencairan yang lebih sederhana. Selain itu perlu koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan swakelola sehingga akan memperlancar administrasi swakelola.
- 4) Untuk mengantisipasi kurangnya kemampuan, pengetahuan dan kompetensi swakelola, maka sebaiknya dilakukan upaya peningkatan

kompetensi/kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana swakelola seperti pelatihan, kursus, dll sehingga kompetensi SDM meningkat dan memenuhi standar kompetensi yang ada.

- 5) Untuk mengantisipasi adanya *Conflict Of Interest*, maka dibutuhkan manajemen proyek yang mempunyai pengalaman dalam pekerjaan konstruksi dan ketegasan pihak-pihak yang terlibat dalam swakelola dalam hal ini PA dan PPK dalam mengambil keputusan serta transparan dalam bertindak, sehingga dapat menghindari banyaknya korupsi yang ada di daerah, karena adanya *Conflict Of Interest* yang terjadi dalam pelaksanaan proyek swakelola.
- 6) Untuk mengantisipasi biaya pengawasan terlalu rendah sehingga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, maka sebaiknya pemerintah daerah membuat aturan di tingkat daerah mengenai kompensasi biaya pengawasan berdasarkan zona agar sesuai dan adil serta berfungsi sebagai motivasi bagi kinerja tim pengawas.

5.2. Saran

Dari penelitian yang dilakukan ada beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya faktor-faktor kendala proyek swakelola ke depannya;
2. Sebaiknya Pemerintah membuat aturan di tingkat daerah tentang swakelola agar pelaksanaan swakelola lebih mudah, baik, efektif dan akuntabel;

3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, dapat dikembangkan dengan melakukan penelitian dengan lingkup yang lebih luas mengenai proyek swakelola yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *“Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik”*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Alfitriadi, (2014), *Pengadaan Barang Jasa Dalam Bentuk Swakelola Pada Fakultas Teknik Unand Padang*, Jurnal, Universitas Tamansiswa.
- El Karriri, A.A., Yasin, M., dan Alhabeel, A., (2011), *“Investigating Key Drivers For Contract Termination in Construction Projects in the Gaza Strip”*, The Islamic University Journal, Vol. 19, No. 1, pp 179-195.
- Elsawalhi, N.I., dan Eid, K.A. (2012), *“Factors Affecting Termination of Construction Contracts”*, The 4th International Engineering Conference – Towards engineering of 21st century.
- Ervianto W,I., (2007), *Teori – Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*. Edisi I. Andi, Yogyakarta.
- Gani, AI. (2011), Kasus Proyek Swakelola PU, Koran Tempo, Makassar, (Online), <http://koran.tempo.co/konten/2011/10/27/252830/KASUS-PROYEK-SWAKELOLA-PURidwan-Muhadir-Dituntut-5-Tahun-Penjara>
- Hardjomuljadi, S. (2009), Strategi Pra Kontrak Untuk Mengurangi Dampak Klaim Konstruksi Pada Proyek Pusat Listrik Tenaga Air Di Indonesia, Disertasi, Universitas Tarumanagara.
- Hardjomuljadi, S (2014), *“Factor Analysis on Causal of Construction Claims and Disputes in Indonesia (with reference to the construction of hydroelectric power project in Indonesia)”*, International Journal of Applied Engineering Research, ISSN 0973-4562, Volume 9, November 22, pp. 12421-12445.
- Hariandialog, (2016), Kasus Korupsi Dana Swakelola, Jakarta Barat, (Online), http://www.hariandialog.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6776:kasus-korupsi-dana-swakelola-kejagung-kembali-tetapkan-11-tersangka&catid=35:politik-a-hukum&Itemid=2
- Irfan, A. (2016), Kadis PU Bone Jalani Pemeriksaan, Rakyat Sulsel, Bone, (Online), <http://rakyatsulsel.com/kadis-pu-bone-8-jam-jalani-pemeriksaan-di-tipikor-polres.html>

- Mustafa, K., (2011), Jebakan Hukum Swakelola Rehabilitasi Sekolah, (Online), <http://www.khalidmustafa.info/2011/12/11/jebakan-hukum-swakelola-rehabilitasi-sekolah.php>
- Mustafa, K., (2014), Swakelola atau Penyedia, (Online), <http://www.khalidmustafa.info/2014/01/24/swakelola-atau-penyedia.php>
- Pius, R. (2015), Dugaan Korupsi Dana Swakelola, Kupang, (Online), <http://kupang.tribunnews.com/2015/05/11/kejari-naikan-status-dugaan-korupsi-dana-swakelola-di-pu-ende>
- Project Management Institute, (2008), *A Guide To The Project Management Body Of Knowledge (PMBOK Guide) Foerth Edition*.
- Rakasiwi, G. (2014), “*Analisis Potensi Penyebab Terjadinya Sengketa Pada Proyek Konstruksi Jalan Tol yang Menggunakan FIDIC General Condition of Contract MDB Harmonised Edition 2006*”. Tesis, Program Magister Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Ramli, S. (2012), Waspada Swakelola DAK Pendidikan, (Online), <http://samsulramli.com/waspada-swakelola-dak-pendidikan/>
- Ramli, S., (2012), *Swakelola DAK Pendidikan Versus P54/2010*, Pengadaan Barang/Jasa, (Online), <http://samsulramli.com/swakelola-dak-pendidikan-versus-p542010/>.
- Ramli, S. F., (2014), *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan.
- Rauf, A.S.M. (2012), “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pemutusan Hubungan Kontrak Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum*”. Tesis, Program Magister Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Riduwan. (2010), “*Metode dan Teknik Menyusun Tesis*”. Alfabeta, Bandung.
- Rusman, M.N.M., (2012), *Faktor-Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Kinerja Waktu Pelaksanaan Konstruksi Gedung Secara Swakelola (Studi Kasus: Proyek Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Di Provinsi aceh*, Jurnal Teknik Sipil, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Sarwono, J. (2006), “*Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*”. Andi, Yogyakarta.

- Soeharto, I. (2011), *Management Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional), Menyiapkan Perangkat, Peserta dan Implementasi Proyek*, Jilid 2. PT. Gelora Aksara Pratama, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sopian, A., *Swakelola Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Balai Diklat Keuangan. Palembang.
- Sugiyono, (2013) *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta : Bandung
- Universitas Katolik Parahyangan. (2015). *Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan*. Bandung.
- Widiasanti, I., Lenggogeni, (2013), *Manajemen Konstruksi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Modul 8. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola. (2014). Deputi Bidang PPSDM LKPP
- Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2013 Perubahan atas Permen PU Nomor: 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli Dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) Noomor 18 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.